

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut.¹

Pendidikan nasional dewasa ini dalam pengamatan pakar pendidikan, berada dalam keadaan terpuruk perlu paradig baru. Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional dengan sendirinya memerlukan paradig baru. Paradigma baru pendidikan haruslah sesuai dengan cita-cita reformasi yaitu membangun masyarakat Indonesia baru.

¹B. Suryosunroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 202-203.

Paradigma pendidikan nasional tentunya diarahkan dalam rangka koridor reformasi menuju masyarakat Indonesia tersebut. Kisi-kisi koridor reformasi yaitu demokrasi, menghormati nilai-nilai manusia atau HAM, dan otonomi daerah yang ditujukan kepada tanggung jawab masyarakat di dalam kehidupannya dalam masyarakat terbuka.²

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang diharapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi ditingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan ditingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya ditingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa 3 kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.³

Perubahan yang diinginkan dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dikaitkan dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd ayat 11:

²H. A. R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 76.

³B. Suryosunroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah...*, h. 203-204.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Berdasarkan ayat di atas yang memiliki pengertian bahwa Allah tidak akan mengubah kemunduran suatu kaum sehingga mereka berusaha mengubah kemunduran tersebut menjadi kemajuan.⁴ perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Bila dikaitkan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan atau mutu sekolah ayat itu sangat relevan. Perubahan yang mesti dilakukan adalah perubahan secara individu yang dapat berdampak secara universal, karena perubahan secara bersama inilah yang dikehendaki oleh Allah terbukti dengan penggunaan kata kaum. Perubahan yang dilakukan secara bersama-sama ini akan membawa imbas yang lebih luas.

Masalah mutu pendidikan merupakan salah satu isu sentral dalam pendidikan nasional, terutama berkaitan dengan rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan media pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Meskipun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan mengindikasikan bahwa berbagai upaya tersebut belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih sangat memprihatinkan.

⁴Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 215-216.

Kondisi tersebut lebih diperparah lagi oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang telah berkembang menjadi krisis multidimensional, dan telah memperburuk berbagai bidang kehidupan termasuk menurunkan mutu pendidikan. Kondisi tersebut telah mengundang berbagai pertanyaan dari berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat umum maupun dikalangan para ahli pendidikan dan para guru.⁵

Masyarakat merupakan komponen utama terselanggaranya proses pendidikan. Kontribusi masyarakat di lingkungan sekolah perlu dioptimalkan sebagai upaya pemberdayaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah dengan paradigm pendidikan yang baru. Masyarakat dapat memberikan sumbangsuhnya kepada sekolah dengan memberikan masukan-masukan terutama dalam penyusunan program-program sekolah.

Masyarakat harus terlibat dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, salah satu diantaranya ialah karena adanya keterbatasan pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Melalui keterlibatan masyarakat, maka kegiatan operasional, kinerja, dan produktivitas sekolah diharapkan dapat terbantu. Namun demikian, harus diingat bahwa peran serta, dukungan, dan simpati masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan tidaklah datang dengan sendirinya. Sekolah perlu secara proaktif dan kreatif mengembangkan hubungan kerjasama yang harmonis dan sinergis dengan masyarakat.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat secara nyata dalam suatu kegiatan. Masyarakat dapat menyumbangkan gagasan, membantu

⁵H.E. Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 158-159.

tenaga, memberikan kritik yang membangun, memberikan motivasi, menyumbangkan keahlian, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan.⁶

Dalam Undang-Undang Sisdiknas (2013) dikemukakan bahwa komite madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali murid, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat, dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen sekolah. Selain itu, dikemukakan bahwa Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota. Keberadaan kedua lembaga tersebut (Komite Madrasah, dan Dewan Pendidikan) merupakan prasyarat mutlak bagi implimentasi manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk menciptakan sekolah yang mandiri, efektif, efisien, produktif, dan akuntabel; kepala sekolah dituntut untuk menggandeng komite sekolah dan dewan pendidikan.⁷

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3, komite sekolah/madrasah adalah “sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.⁸

⁶Abdul Rahmat, *Manajemen Humas Sekolah*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), h. 140-141.

⁷E. Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah...*, h. 126.

⁸Baharuddin dan Moh. Hakim, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 93-96.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan diperlukan wadah untuk mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.⁹

MAN 1 Tabalong merupakan salah satu sekolah Negeri yang ada di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitasnya, MAN 1 Tabalong berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan mulai dari tingkat gugus, kecamatan, hingga kabupaten, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Melalui berbagai macam kegiatan itulah sekolah dapat menganalisis potensi-potensi yang dimiliki sekolah yang dapat dijadikan sebagai pendukung peningkatan kualitas sekolah dan mengevaluasi bagian mana yang kurang untuk dapat dikembangkan lebih optimal.

Selama ini sebagian besar masyarakat/orang tua siswa MAN 1 Tabalong masih berpandangan bahwa Komite Madrasah merupakan organisasi dalam sekolah yang beranggotakan perwakilan orang tua siswa dan bergerak dalam bidang finansial (dana) saja. Sementara sebagian sekolah membentuk Komite Madrasah masih sebatas untuk memenuhi persyaratan mendapatkan subsidi. Idealnya, peran Komite Madrasah adalah wadah bertemunya pihak sekolah, orang tua dan masyarakat dalam rangka berkoordinasi mengenai perkembangan yang terjadi di dalam sekolah, baik yang berkaitan dengan peserta didik maupun hal-hal lain yang menyangkut kelangsungan lembaga. Bentuk realisasi peran tersebut, Komite Madrasah dan pihak sekolah dapat mengadakan koordinasi

⁹Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), Cet. ke-2, h. 87.

secara rutin guna membahas perkembangan sekolah dan memperbaiki sistem serta kinerja yang dirasa kurang optimal.

Alasan peneliti memilih tema di atas, karena Komite Madrasah merupakan organisasi dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERAN KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 TABALONG.**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong?

C. Definisi Operasional

1. Pengertian peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

masyarakat”.¹⁰ Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemain sandiwara.¹¹

2. Komite madrasah

Komite Sekolah berasal dari dua kata yaitu ”Komite dan Sekolah”. Dalam Kamus Ilmiah Populer “Komite” adalah badan, dewan, panitia.¹² Berarti komite adalah sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Sedangkan “Sekolah” adalah tempat dimana terjadi proses belajar mengajar serta tempat memberi dan menerima pelajaran menurut tingkatannya masing-masing. Komite sekolah merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas (2013) dikemukakan bahwa komite madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali murid, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat, dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen sekolah.¹³

3. Mutu pendidikan

Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.¹⁴ Masalah mutu pendidikan merupakan salah satu masalah nasional yang dihadapi dan mendapat perhatian sungguh-sungguh dalam sistem

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), ed. 2. Cet. ke-8. h. 751.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 1990), Cet. ke-3. h. 667.

¹²Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: GitaMedia Press, 2006), Cet. ke-1. h. 256.

¹³E. Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah...*, h. 126.

¹⁴Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu:Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. ke-4. h. 75.

pendidikan nasional di Indonesia, mengingat mutu pendidikan merupakan sumber dari kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses dan hasil pendidikan. Dalam UU No. 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah di bentuknya komite sekolah yang mewadahi peran serta masyarakat untuk membantu sekolah meningkatkan mutu pendidikan.¹⁵

D. Tujuan Penelitian

Tujuan utama yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan yang berkenaan dengan peran komite madrasah dalam meningkatkan

¹⁵Bodi Kurniawan, *Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 8.t.d.

mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong dan juga diharapkan berguna sebagai panduan penulisan.

2. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Peneliti mendapatkan pengalaman yang mendalam mengenai bagaimana peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan saran bagi semua pihak terutama pihak sekolah dan juga bagi komite madrasah itu sendiri.

F. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendasari peneliti memilih judul peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tabalong, yaitu:

1. Karena komite madrasah merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi manajemen berbasis madrasah (MBS) yang efektif dan efisien.
2. Karena komite madrasah adalah salah satu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, dan gagasan dalam peningkatan pendidikan.
3. Dengan adanya komite madrasah hubungan antara masyarakat dengan sekolah dalam hal kerjasama memberikan dukungan untuk pencapaian tujuan pendidikan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman gambaran awal tentang penelitian ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Alasan Memilih Judul, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II Landasan Teori memuat pengertian peran, komite madrasah dan mutu pendidikan.
3. Bab III Metode Penelitian memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta prosedur penelitian.
4. Bab IV berisikan penyajian data, dan analisis data.
5. Bab V berisikan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.